

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. Pada kuartal Triwulan III tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5.58. Angka tersebut masih di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.72. padahal sepanjang tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi nasional berada kisaran -2.07, sementara laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar -2.33. sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen(BAPPENAS:2022).

Data tersebut semakin memvalidasi bahwa pandemi Covid-19 benar-benar telah berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka sangat wajar jika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Implementasi RKP 2020 yang mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” sangat penting untuk capaian awal tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sejumlah target indikator makro ditetapkan untuk dicapai pada 2020, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,5 persen, tingkat kemiskinan 8,5–9,0 persen, Rasio Gini sebesar 0,375–0,380, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8—5,1 persen(BAPPENAS:2022).

RKP 2020 dijabarkan dalam lima Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar 157,1 triliun rupiah, PN 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan alokasi anggaran senilai 75,5 triliun rupiah, PN 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar 24,4 triliun rupiah, PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

dengan alokasi anggaran sebesar 43,7 triliun rupiah, dan PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan alokasi anggaran senilai 36,6 triliun rupiah. Total alokasi anggaran bagi kelima PN yang diamanatkan dalam RKP 2020 adalah sebesar 337,3 triliun rupiah. “Dari lima prioritas nasional tersebut, maka kita bisa lihat bahwa prioritas nasional dengan porsi anggaran terbesar mencapai 157,1 triliun rupiah adalah untuk Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,” (BAPPENAS:2022).

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui implementasi program prioritas perlindungan sosial kelompok rentan dan penduduk miskin, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/PBI) untuk 96,8 juta jiwa, bantuan pendidikan bagi siswa miskin atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 20,1 juta siswa, bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin melalui Bidik Misi dan KIP-Kuliah untuk 462 ribu mahasiswa, Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) sebesar 10 juta keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai/Keluarga Sangat Miskin (BPNT/KSM) untuk 15,6 juta keluarga. Untuk penanganan stunting, disediakan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis untuk 345 ribu ibu hamil dan makanan tambahan bagi balita kurus 602 ribu balita, serta penyediaan obat gizi seperti Vitamin A Merah, Vitamin A Biru, Tablet Penambah Darah Ibu Hamil. Di bidang pendidikan, pemerintah fokus untuk pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas dari Sekolah Dasar hingga pendidikan tinggi.

Meskipun pada periode Maret-September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai 313.130 jiwa. Kemudian, pada periode Maret 2021-Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa (tertinggi nasional)(BPS Jatim:2022). Pemerintah Desa Ngabar sebagai sub sistem pemerintah yang menjadi ujung tombak pemerintah, terus melakukan upaya-upaya inovatif untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan kewirausahaan. Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa Ngabar yang unik adalah budidaya ternak jangkrik. Kebutuhan komoditas jangkrik sepanjang 3 tahun terakhir di kabupaten Ponorogo relatif tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki hobby memelihara burung kicau dengan berbagai variannya.

Merujuk pada Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa pada tahun 2021 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ada beberapa inovasi kewirausahaan yang bersumber dari dana Desa. Program Pemberdayaan Desa tersebut salah satunya adalah Program Kewirausahaan yang berkaitan dengan Budidaya ternak jangkrik. Budidaya ternak jangkrik telah sangat membantu dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19(Kemendes-PDPT:2022).

Budidaya ternak jangkrik ini berlokasi di RT 01 RW 01 Dusun 03 Desa Ngabar. Dari sisi pengambilan kebijakan Pemerintah Desa Ngabar bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngabar dengan melibatkan masyarakat mengadakan musyawarah untuk menjangkir dan menyaring aspirasi dan usulan. Dari beberapa usulan yang sangat unik dan menarik untuk dikembangkan yakni budidaya ternak jangkrik sebagai sub sistem ekonomi yang menyokong ekonomi. Program ini diketuai oleh Pak Darmo. Selain dalam pemeliharaan, jangkrik termasuk serangga yang ramai peminat, karena sebagai salah satu komoditas pakan burung kicau yang sedang digemari masyarakat. Lalu, usulan masyarakat ini dibahas dalam musyawarah lingkungan dan berlanjut ke tahap musyawarah dusun yang menghasilkan hasil musyawarah dusun lalu ke musyawarah desa dan akhirnya ditetapkan sebagai skala prioritas usulan desa sekaligus masuk dalam Rencana Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Selepas tahap-tahap di atas, masuklah pada tahap realisasi anggaran yang diawali dengan pelatihan bagi calon pengelola. Selanjutnya berlanjut ke tahap pelaksanaan dengan mempersiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Masa pemeliharaan jangkrik dari bibit sampai dengan siap panen adalah dua bulan. Setelah dua bulan pemeliharaan, maka jangkrik hasil budidaya siap untuk dipanen. Tujuan dari program kewirausahaan ini adalah untuk mengangkat ekonomi masyarakat sebagai tambahan pendapatan di tengah masa pandemi. Juga menjadi inovasi desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mampu dan tercukupi semua kebutuhan. Selanjutnya dapat mengurangi angka pengangguran dari dampak pandemi Covid-19 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dari alasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan

akibat Covid-19 (Studi Kasus Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”.

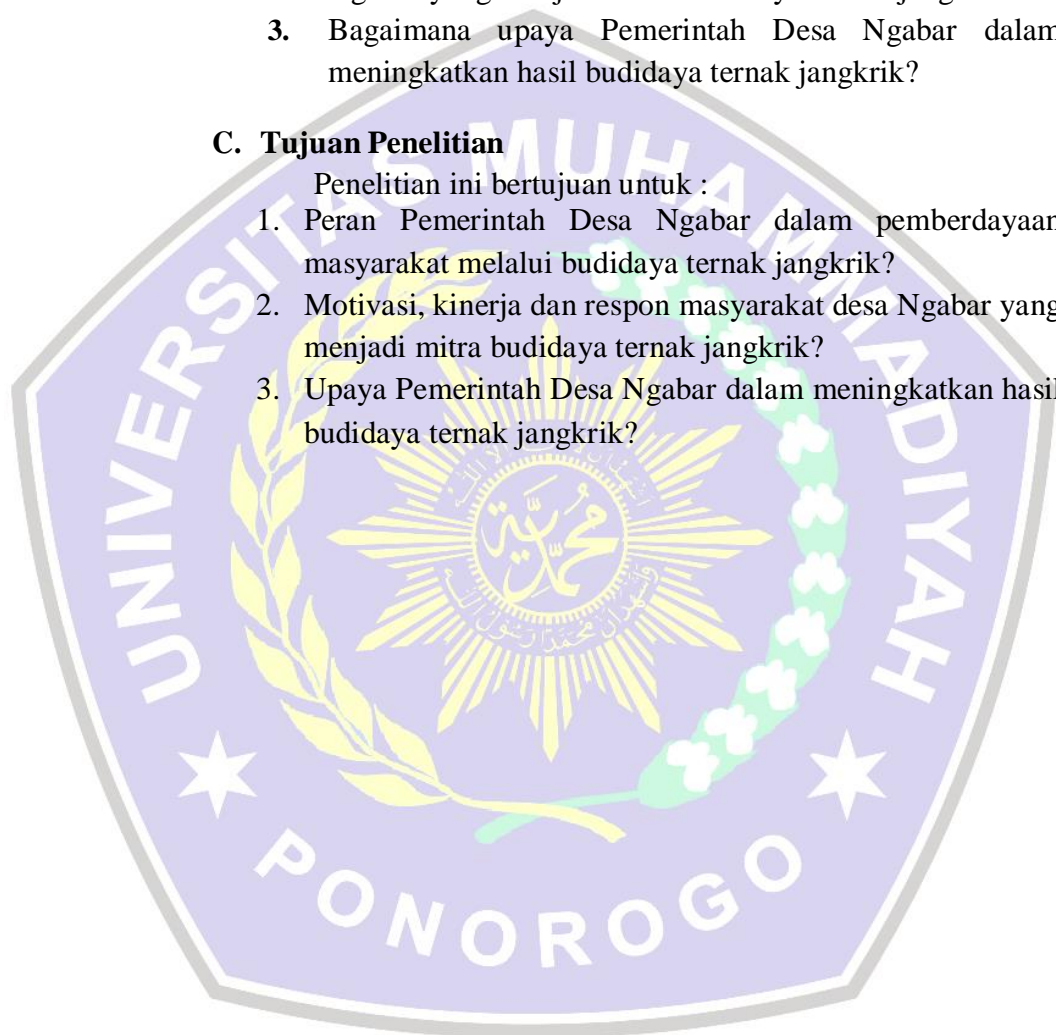
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Ngabar dalam pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ternak jangkrik?
2. Bagaimana motivasi, kinerja dan respon masyarakat desa Ngabar yang menjadi mitra budidaya ternak jangkrik?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Ngabar dalam meningkatkan hasil budidaya ternak jangkrik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Peran Pemerintah Desa Ngabar dalam pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ternak jangkrik?
2. Motivasi, kinerja dan respon masyarakat desa Ngabar yang menjadi mitra budidaya ternak jangkrik?
3. Upaya Pemerintah Desa Ngabar dalam meningkatkan hasil budidaya ternak jangkrik?



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang ini:
2. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan.
3. Dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan Pemerintah Desa terutama dalam Pengentasan Kemiskin Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
4. Menjadi bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Desa dalam pengambilan kebijakan.
5. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (wilayah) untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penelitian selanjutnya.
6. Menjadi sebuah karya yang melengkapi pengetahuan dan wawasan yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.